

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LABA

Ariestya Alfianti Puteri¹, Erwin Saraswati²

¹Mahasiswa Jurusan Akuntansi, ²Dosen Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jalan Mayjen Haryono 165 Malang 65145
E-mail:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh struktur *corporate governance* dan kualitas audit terhadap kualitas laba. Penelitian ini menggunakan 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2019 dengan teknik *purposive sampling*. Data penelitian dikumpulkan dari laporan tahunan periode 2011-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan jumlah rapat komite audit dapat meningkatkan kualitas laba, terutama pada perusahaan besar. Hal ini karena komisaris independen dan komite audit dinilai aktif dalam melakukan fungsi pengawasan pelaporan keuangan serta menjamin bahwa mekanisme GCG diterapkan dengan baik di perusahaan. Sebaliknya, pada perusahaan menengah, komisaris independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, karena jumlah komisaris independen dan rapat komite audit perusahaan dinilai sebatas untuk memenuhi ketentuan formal, serta efektivitas pengawasan tidak dapat diukur melalui jumlah rapat saja. Selain itu, pada perusahaan manufaktur di Indonesia, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, karena pemilik saham institusional cenderung berfokus pada laba jangka pendek. Kualitas audit yang dicerminkan oleh ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba karena kurangnya independensi auditor di Indonesia, serta tujuan auditor hanya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan bukan kualitas laba perusahaan.

Kata Kunci: *Good corporate governance, kualitas audit, kualitas laba, manajemen laba, ukuran KAP.*

ABSTRACT

This study aims to explain the effect of corporate governance structure and audit quality on earnings quality. This study used 74 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2019 with a purposive sampling technique. The research data were collected from the annual reports for the period 2011-2019. The data analysis method used is multiple linear regression. The results showed that independent commissioners and the number of audit committee meetings can improve earnings quality, especially in large companies. This is because the independent commissioners and audit committee are considered active in carrying out the function of monitoring financial reporting and ensuring that the GCG mechanism is properly implemented in the company. On the other hand, in medium-sized companies, independent commissioners and the number of audit committee meetings have no effect on earnings quality, because the number of independent commissioners and company audit committee meetings is considered only to meet formal requirements, and the effectiveness of supervision cannot be measured by the number of meetings alone. In addition, in manufacturing companies in Indonesia, institutional ownership has no effect on earnings quality, because institutional shareholders tend to focus on short-term earnings. Audit quality which is reflected by the size of auditor has no effect on earnings quality due to the lack of independence of auditors in Indonesia, and the objective of auditors is only to increase the credibility of financial statements and not the quality of company earnings.

Keywords: Good corporate governance, audit quality, earnings quality, earnings management, auditor size

PENDAHULUAN

Salah satu informasi krusial yang terkandung dalam laporan keuangan adalah laba. Laba merupakan informasi penting dari laporan keuangan, karena mampu mencerminkan kinerja perusahaan (Dichev, 2016). Berdasarkan Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba penting karena laba berhubungan dengan earnings power perusahaan di masa yang akan datang, serta menjadi dasar pertimbangan penentuan kompensasi manajemen dan pemberian dividen.

Skandal kecurangan akuntansi yang menjerat perusahaan besar Enron yang kemudian menyebar hingga WorldCom dan Xerox tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat saja, namun juga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Salah satunya adalah kasus rekayasa informasi laba juga dilakukan oleh PT Inovisi Infracom (INVS). Dalam keterbukaan informasi INVS pada Februari 2015, BEI menemukan delapan item dalam laporan keuangan INVS periode September 2014 yang harus diperbaiki karena salah saji, yakni nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, serta jumlah kewajiban dalam informasi usaha. Selain itu, INVS juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan periode berjalan yang menyebabkan laba bersih per saham, INVS tampak lebih besar daripada yang seharusnya. Hal ini menyalahi ketentuan yang mewajibkan perseroan untuk menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibatnya, BEI melakukan penghentian (suspend) terhadap perdagangan saham INVS pada bulan Februari dan Mei 2015.

Selain itu, kasus manajemen laba yang baru ini terjadi dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terhadap laporan keuangannya di tahun 2017. Ernst & Young Indonesia (EY) melakukan investigasi berbasis fakta terhadap manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019 atas dugaan pengelembungan pada pos-pos akuntansi yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar selama 2017. EY menemukan adanya overstatement senilai Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, serta aset tetap AISA. Selain itu juga terdapat overstatement pada akun penjualan senilai Rp 662 miliar dan pada EBITDA yang disajikan sebesar Rp 329 miliar. Hal ini membenarkan dugaan EY bahwa

perusahaan melakukan manajemen laba untuk membuat rugi bersih perusahaan tampak lebih kecil daripada yang seharusnya untuk menjaga nilai perusahaan agar tidak jatuh di mata investor (Kusuma dan Mertha, 2021).

Fenomena ini menunjukkan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunaannya. Informasi laba sebagai komponen penting dalam laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya mengenai kondisi finansial perusahaan, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya penting bagi para stakeholder yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan atau pengambilan keputusan investasi (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Susanto dan Siregar, 2012).

Kualitas laba mengacu pada stabilitas, persistensi (persistence), serta angka laba yang tidak fluktuatif. Laba yang berkualitas harus mencerminkan nilai instrinsik yang mendasarinya, yakni aktual. Dalam memperhitungkan laba, diperlukan estimasi-estimasi dan penilaian yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan. Kesalahan dalam estimasi dan penilaian dapat menyebabkan timbulnya koreksi di masa depan, sehingga laba saat ini tidak dapat dijadikan acuan untuk memproyeksikan laba di masa mendatang (Yulianda dan Sebrina, 2017). Laba dikatakan berkualitas pada saat tidak adanya gap antara aktual dan arus kas (Dichev, 2016), sehingga dapat dikatakan bahwa aktual mencerminkan arus kas di masa depan yang akan terealisasi dengan tepat.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat membantu stakeholders dalam membuat keputusan. Adapun model yang digunakan untuk mengukur kualitas laba adalah model kualitas aktual yang dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002). Model ini telah diterima secara luas sebagai alat ukur untuk mendeteksi manipulasi laba dan ketidakpastian aktual (Dechow et al., 2010). Hal ini sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevansi yang mengandung komponen prediktif laba di dalamnya, selain itu dapat dilihat

bagaimana keakuratan estimasi akrual dalam setiap penyajian laba pada laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menjadi landasan dalam memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) mencetuskan sebuah model hubungan kontraktual antara pemilik (principal) sebagai pemilik sumber daya ekonomis dan manajer (agent) sebagai pengguna dan pengendali dari sumber daya tersebut. Pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan dari pemilik kepada manajer perlu dilakukan sesuai kontrak yang disepakati agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar. Meisser, et al (2006) menemukan dua permasalahan yang timbul akibat hubungan kontraktual ini: (1) terdapat asimetri informasi yang membuat manajemen memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik mengenai posisi sebenarnya dari keuangan dan operasi entitas, (2) terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan tujuan sehingga manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemilik. Sebagai agent, manajer memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan keuntungan pemilik (principal), namun juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan antara principal dan agent inilah yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan atau agency problem. Manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai kondisi sebenarnya dari perusahaan. Oleh karena itu, manajer menguasai informasi yang lebih banyak daripada pemilik. Terjadinya asimetri informasi ini menimbulkan kesulitan bagi principal dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen berpotensi untuk mengambil tindakan oportunistik yang hanya menguntungkan diri sendiri (Emirzon, 2007; Lisa, 2012).

Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate governance atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat regulasi yang mengatur hubungan antara pemegang dan pengurus saham, pemerintah, kreditor, karyawan, serta pemangku kepentingan

intern dan ekstern yang terkait dengan kewajiban serta hak mereka untuk mengelola perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), corporate governance merupakan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai tambahnya secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan para stakeholders dan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Diperlukannya corporate governance, khususnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan corporate governance dalam setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran perusahaan berlandaskan pada lima asas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

1. Transparency (Transparency)

Perusahaan wajib menyediakan informasi yang material dan relevan untuk pengambilan keputusan stakeholder dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Untuk menjaga objektivitas dalam bisnis, perusahaan juga wajib mengungkapkan permasalahan di luar yang dipersyaratkan peraturan undang-undangan apabila permasalahan tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan stakeholder.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan selaras dengan kepentingan perusahaan serta kepentingan stakeholders. Pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar merupakan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Untuk dapat menjadi perusahaan yang sustainable, perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sekaligus melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan.

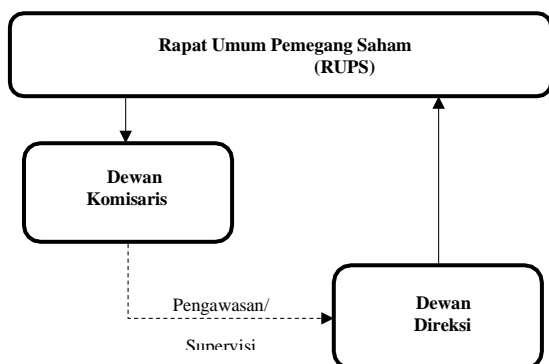
4. Independensi (Independency)

Perusahaan wajib dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan mengintervensi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan praktik bisnisnya, perusahaan harus memerhatikan dan memenuhi hak-hak stakeholder dengan perlakuan yang adil dan setara. Pelaksanaan corporate governance memerlukan suatu mekanisme yang berdasarkan pada aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak- pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Mekanisme corporate governance terdiri dari tiga elemen penting yang membuat perusahaan dapat mengarahkan dan menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan tujuan perusahaan; yakni struktur, sistem, dan proses (Bukhori & Raharja, 2012).

Struktur corporate governance merupakan kerangka dasar yang menjelaskan hubungan antar berbagai kepentingan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal perusahaan, sehingga perusahaan dapat menentukan arahan strategis serta melakukan pengawasan terhadap kinerjanya (Bukhori & Raharja, 2012). KNKG menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut two-board system yang membagi wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi dengan jelas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan. Akan tetapi, dalam model two-board system yang diterapkan di Indonesia, wewenang pengangkatan dan pemberhentian direksi berada di tangan RUPS. Hal ini menyebabkan kedudukan dewan komisaris sejajar dengan kedudukan dewan direksi. Model two-board system di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Two-board System yang Berlaku di Indonesia

Sumber: FCGI 2001

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan KNKG, dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Sedangkan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Penelitian ini berfokus pada komisaris independen yang tergabung dalam jajaran dewan komisaris perusahaan karena dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan supervisi atau pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi dan manajemen. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan komite audit serta kepemilikan institusional sebagai bagian dari struktur corporate governance yang akan diteliti pengaruhnya terhadap kualitas laba.

Kualitas Audit

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran KAP. Perbedaan kualitas audit yang dihasilkan menimbulkan adanya perbedaan dalam kualitas laba (earning quality) dari klien KAP yang bersangkutan (Herusetya, 2009). Hal ini sejalan dengan temuan Chen et al (2004) yang menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas audit, maka laba yang tersaji dalam laporan keuangan yang diaudit akan cenderung mengandung akun-akun yang tidak terlalu tepat menggambarkan hasil operasi serta kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan menggunakan ukuran KAP. Firth dan Liao Tan (1998) menggunakan indikator-indikator berikut dalam menentukan ukuran auditor: (i) jumlah dan ragam klien yang ditangani, (ii) variasi ragam jasa yang ditawarkan, (iii) luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional, serta (iv) jumlah staf audit yang terdapat dalam KAP.

Selain itu, Choi et al (2010) menyatakan dua perspektif terkait pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit, yakni: 1) economic dependence perspective, yaitu kecenderungan KAP kecil (Non Big 4) untuk berkompromi terhadap kualitas audit karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap klien, 2) uniform quality

perspective, yakni kemampuan KAP besar (Big 4) dalam mendistribusikan pengetahuan di antara kantor-kantor cabang (afiliasi) yang dimiliki sehingga mampu menciptakan kualitas audit yang seragam pada pusat maupun cabang. Oleh karena itu, semakin besar ukuran KAP, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Watts dan Zimmerman, 1986). Dengan kualitas audit yang baik, maka laba yang tersaji dalam laporan keuangan dapat diyakini sebagai laba yang berkualitas.

Kualitas Laba

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa informasi laba rugi dan komponennya merupakan fokus utama dari laporan keuangan. Dalam PSAK Nomor 1, disebutkan bahwa informasi laba dibutuhkan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang dapat dikendalikan di masa depan, memprediksi kemampuan untuk menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, serta untuk menilai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (IAI, 2004). Oleh karena pentingnya informasi laba bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya tinggi atau rendahnya nominal laba saja yang menjadi perhatian utama stakeholders, melainkan juga kualitas dari laba itu sendiri (Yulianda dan Sebrina, 2017). Spiceland (2015) mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dilaporkan saat ini dalam memprediksi laba di masa mendatang. Selanjutnya, Dechow (2010) memaparkan bahwa laba dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi kondisi berikut: (i) informasi laba relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, (ii) angka atau nominal laba cukup merefleksikan kondisi keuangan perusahaan, dan (iii) sistem akuntansi mampu mengukur kinerja keuangan, sehingga keputusan yang diambil relevan dengan kinerja keuangan saat ini.

Salah satu proksi yang digunakan dalam mengukur kualitas laba adalah kualitas akrual. Kualitas akrual mengacu pada bagaimana komponen-komponen dalam laba dapat memberikan informasi yang representatif dan relevan bagi para stakeholder untuk membuat keputusan yang tepat di masa mendatang (Schipper dan Vincent, 2003; Dechow et al., 2010). Kualitas akrual penting untuk diukur karena komponen akrual memiliki unsur estimasi future cash flows, deferral arus kas masa lalu, serta alokasi dan valuasi yang memiliki tingkat

subjektivitas yang tinggi (Richardson et al, 2005). Pengukuran kualitas akrual berarti mengukur tingkat kesalahan (error) dalam penggunaan akrual dalam penentuan laba perusahaan.

Pengukuran kualitas akrual dalam penelitian ini menggunakan model Dechow dan Dichev (2002) yang dimodifikasi oleh McNichols (2002) sebagai berikut:

$$\Delta WC_t = \beta_0 + \beta_1 \times CFO_{t-1} + \beta_2 \times CFO_t$$

$$+ \beta_3 \times CFO_{t+1} + \beta_4 \times \Delta REV_t + \beta_5 \times PPE_t + \varepsilon_1$$

Keterangan:

ΔWC_t = Perubahan modal kerja akrual (working capital accrual) pada tahun t yang mencakup perubahan akun piutang, utang, persediaan, investasi jangka pendek, provisi, serta aset lancar dan utang lancar lainnya

CFO_{t-1} = Cash flow form operation pada tahun t-1
 CFO_t = Cash flow form operation pada tahun t

CFO_{t+1} = Cash flow form operation pada tahun t+1

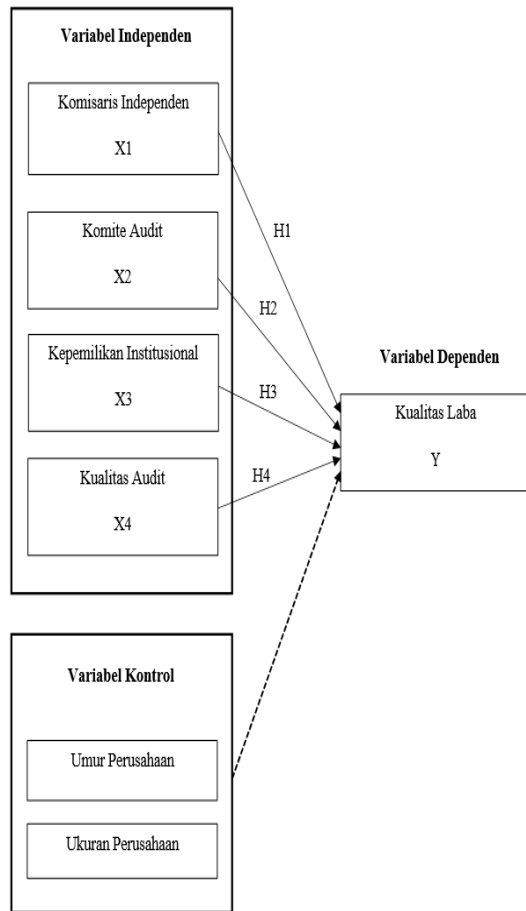
ΔREV_t = Perubahan pendapatan dari aktivitas operasi pada tahun t

PPE_t = Nilai property, plant and equipment yang dilaporkan pada tahun t

Seluruh variabel dibagi lagged total assets (total aset pada tahun t-1)

Nilai residual (error) dari model ini menjadi ukuran dari kualitas akrual, di mana nilai error yang tinggi menunjukkan kualitas akrual yang buruk dan nilai error yang rendah menunjukkan kualitas akrual yang baik.

Kerangka Teoritis



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian kemudian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Ada pun kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2011-2019
- Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan diaudit lengkap selama periode pengamatan 2011-2019
- Perusahaan yang secara konsisten menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang Rupiah
- Perusahaan yang menerapkan dan mengungkapkan pelaksanaan good corporate governance di dalam laporan tahunannya

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Struktur Corporate Governance

a. Komisaris Independen

Komposisi komisaris independen merupakan perbandingan jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan perusahaan. Peran komisaris independen sebagai pelaksana fungsi pengawasan dapat memengaruhi manajemen dalam mempersiapkan laporan keuangan, sehingga dapat dihasilkan laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur melalui besarnya presentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan.

b. Jumlah Pertemuan Komite Audit

Jumlah pertemuan komite audit merupakan akumulasi seluruh pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Xie et al (2003), jumlah pertemuan komite audit dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap tindakan manajemen. Jumlah pertemuan komite audit diukur dengan melihat jumlah rapat komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan, laporan tata kelola perusahaan, maupun laporan komite audit.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besar presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menghalangi perilaku oportunistik manajemen karena keterlibatan investor institusional dalam pengambilan keputusan strategis (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini, ukuran kepemilikan institusional diukur melalui besarnya presentase kepemilikan saham oleh pihak institusional.

Kualitas Audit

Menurut Sopian (2014) ketika audit dilakukan oleh KAP besar yang telah memiliki reputasi, maka KAP tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam mencegah tindakan oportunistik manajemen. Hal ini sejalan dengan temuan Watts

dan Zimmerman (1986) yang mengemukakan bahwa semakin besar ukuran KAP, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Dengan kualitas audit yang baik tersebut, auditor dinilai memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas laba perusahaan yang diauditnya. Oleh karena itu, kualitas audit diproyeksikan menggunakan ukuran KAP. Dalam penelitian ini, ukuran KAP diukur menggunakan variabel dummy, yakni nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 atau KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4, dan nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 4 atau KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4.

Variabel Dependen Kualitas Laba

Salah satu bentuk pengukuran kualitas laba (earnings quality) adalah dengan menggunakan kualitas akrual (Accruals Quality) yang didapatkan dari besarnya tingkat error pada akrual perusahaan. Pengukuran kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran kualitas akrual Dechow dan Dichev (2002) yang dimodifikasi oleh McNichols (2002). Model Dechow dan Dichev (2002) yang dimodifikasi oleh McNichols (2002) mendefinisikan akrual modal kerja sebagai pemetaan dari arus kas masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta pengaruh dari tingkat pendapatan atau penjualan, serta Property, Plant, dan Equipment (PPE). Nilai error atau nilai residual dari model ini yang kemudian menjadi ukuran dari kualitas akrual. Nilai error yang rendah mengindikasikan kualitas akrual dan kualitas laba yang baik, sedangkan nilai error yang tinggi mengindikasikan kualitas akrual dan kualitas laba yang buruk. Model regresi yang digunakan untuk mengukur kualitas akrual adalah sebagai berikut:

$$\Delta WC_t = \beta_0 + \beta_1 \times CFO_{t-1} + \beta_2 \times CFO_t + \beta_3 \times CFO_{t+1} + \beta_4 \times \Delta REV_t + \beta_5 \times PPE_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

ΔWC_t = Perubahan modal kerja akrual (working capital accrual) pada tahun t yang mencakup perubahan akun piutang, utang, persediaan, investasi jangka pendek, provisi, serta aset lancar dan utang lancar lainnya

CFO_{t-1} = Cash flow form operation pada tahun t-1
 CFO_t = Cash flow form operation pada tahun t
 CFO_{t+1} = Cash flow form operation pada tahun t+1

ΔREV_t = Perubahan pendapatan dari aktivitas operasi pada tahun t

PPE_t = Nilai property, plant and equipment yang dilaporkan pada tahun t

Seluruh variabel dibagi lagged total assets (total aset pada tahun t-1). Model regresi pada persamaan di atas dihitung untuk setiap tahun mulai tahun 2012 hingga tahun 2018. Pengukuran keseluruhan kualitas akrual untuk setiap perusahaan merupakan standar deviasi dari nilai residual regresi untuk tiap perusahaan selama 7 tahun.

Variabel Kontrol Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan modalnya, karena umur perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk tetap survive dan tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang ada (Bestivano, 2013). Oleh karena itu, perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas labanya karena pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya. Umur perusahaan diukur dari tanggal pendiriannya maupun tanggal terdaptarnya di BEI. Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur dari tanggal tercatatnya perusahaan di BEI dan dinyatakan dalam satuan bulan.

$$AGE = LN(\text{Firm Age in Months})$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kategori, antara lain perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil (Wati dan Putra, 2017). Perusahaan yang tergolong besar pada umumnya akan lebih transparan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena lebih diperhatikan oleh pihak eksternal, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba (Agustia dan Suryani, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan.

$$SIZE = LN(\text{Total Assets}).$$

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan dan data kuantitatif lainnya selama periode tahun 2011 hingga tahun 2019. Data-data tersebut diperoleh dari situs resmi masing-masing perusahaan, situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni www.idx.co.id, portal penyedia data laporan keuangan www.riset.or.id, serta database Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelusuran data yang diperoleh dari sumber literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan komputer untuk data dalam format elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini antara lain berupa jurnal, buku, skripsi, tesis, laporan keuangan dari situs perusahaan, IDX maupun situs lainnya, serta artikel terkait lainnya yang diperoleh dari situs internet.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba

Hasil pengujian yang dilakukan pada keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel menunjukkan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini serupa dengan hasil uji pada kelompok perusahaan besar yang terdiri dari 66 perusahaan dan kelompok perusahaan menengah yang terdiri dari 8 perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa besar presentase kepemilikan saham yang dimiliki institusi atas perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dari perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi yang dimiliki institusi atas saham perusahaan (Ashkhab dan Agustina, 2015). Institusi yang dimaksud dapat berupa pemerintahan, bank, dana pensiun, maupun perusahaan lain yang berada di dalam dan luar negeri. Adanya mekanisme kepemilikan institusional diharapkan dapat memotivasi

manajemen untuk memberikan performa yang terbaik serta mengambil keputusan yang pro-pemegang saham. Manajemen sebagai agent yang mengelola perusahaan akan berupaya untuk memenuhi keinginan investor institusi atas pengembalian (return) yang setinggi mungkin. Apabila manajemen dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka pihak institusi dapat melakukan perubahan-perubahan berarti atas nama pemegang saham (Juniarti dan Sentosa, 2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penemuan Boediono (2005), Ujijanto dan Pramuka (2007), Irawati dan Sudirman (2016), serta Kristanti dan Hendratno (2017).

Emiten yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki struktur kepemilikan institusional dalam jumlah yang cukup besar, hal ini terlihat pada rata-rata kepemilikan institusional yakni 74,72%, yang mencerminkan bahwa investor institusi secara umum memiliki kontrol yang besar terhadap perusahaan.

Selain itu, pada umumnya pemilik institusional tidak menjalankan perannya sebagai sophisticated investor yang dapat mengawasi kinerja manajemen dengan lebih baik, terutama dalam hal tindakan oportunistik yang mengarah kepada manajemen laba. Pemilik institusional hanya berperan sebagai transient investors atau pemilik sementara perusahaan yang justru hanya berfokus terhadap laba jangka pendek saja (Kristanti dan Hendratno, 2017). Hal ini menyebabkan pemilik saham institusional kurang menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam memerhatikan kelangsungan hidup perusahaan yang tercerminkan melalui kualitas laba yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Selain itu, tanggung jawab pemilik institusional sebagai pemegang saham pengendali (kepemilikan lebih dari 50%) hanya sebatas untuk menjaga akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan saja, sehingga pemilik institusional tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pengelolaan perusahaan serta penyusunan laporan keuangan perusahaan, termasuk penyajian informasi laba beserta kualitasnya.

Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan dua hasil sebelumnya yang mendukung temuan Astari dan Suryawana (2017) serta Rona et al (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Laba

Hasil pengujian yang dilakukan pada keseluruhan perusahaan dan kelompok perusahaan besar yang terdiri dari 66 perusahaan menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris perusahaan, maka semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dalam pelaksanaannya, anggota dewan komisaris haruslah profesional dan berintegritas, serta memastikan bahwa direksi telah memerhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris meliputi tindakan pencegahan, sampai kepada pemberhentian sementara. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dewan komisaris dapat menunjuk komisaris independen, yakni anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. OJK menetapkan jumlah tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2007 pasal 19, yakni persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rona et al (2015) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Menurut Fama dan Jensen (dalam Murtini dan Mansyur, 2016), kehadiran dewan komisaris independen sebagai non-executive director dapat

berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik yang terjadi antara manajer-manajer internal, serta memberi nasihat dan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen. Oleh karena itu, peran komisaris independen yang ikut mengawasi tindakan manajemen dapat mempersempit peluang manajer untuk melakukan tindakan oportunistik manajemen laba. Pernyataan tersebut juga didukung oleh temuan Beasley (1996) dalam Boediono (2005) yang menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan memiliki presentase komisaris independen yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Cornett et al (2006) juga memberikan hasil temuan serupa, bahwa dengan meningkatnya tindakan pengawasan dari anggota dewan komisaris yang berasal dari luar, maka penggunaan discretionary accruals oleh manajemen akan semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi monitoring atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat meningkatkan kualitas laba (Vafeas, 2000).

Namun, hasil pengujian yang dilakukan terhadap 8 perusahaan menengah menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Apabila merujuk pada Tabel 4.4, rata-rata komposisi komisaris independen perusahaan berukuran menengah dalam sektor manufaktur telah memenuhi regulasi minimum, yakni 43,37% (lebih dari 30%), namun perlu dipertimbangkan bahwa proporsi tersebut bukanlah faktor utama dari efektivitas kontrol terhadap manajemen, melainkan kapabilitas, integritas, serta kompetensi dari anggota komisaris independen itu sendiri.

Selain itu, terdapat kemungkinan penempatan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris hanya untuk memenuhi ketentuan formal saja, sehingga keberadaan komisaris independen hanya sekadar formalitas. Hal ini didukung dengan survey Asian Development Bank dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas membuat dewan komisaris tidak independen dan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat berjalan efektif. Kurangnya pengawasan inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan-

kecurangan dalam perusahaan yang berdampak pada rendahnya kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan (Nanang dan Tanusdjaja, 2019).

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Laba

Hasil pengujian yang dilakukan pada keseluruhan perusahaan dan kelompok perusahaan besar yang terdiri dari 66 perusahaan menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini membuktikan bahwa sering pertemuan yang dilaksanakan omite audit dalam setahun, maka semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

KNKG menyebutkan komite audit merupakan komite penunjang yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris memastikan bahwa (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut Chrisdianto (2013) komite audit merupakan penunjang dewan komisaris dan berperan sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen yang pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Suaryana, 2005). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit wajib paling sedikit mengadakan rapat secara berkali yakni 1 kali dalam 3 bulan, atau 4 kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 pasal 13.

Hasil penelitian pada keseluruhan perusahaan dan 66 perusahaan besar menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan Xie et al (2003), Putri dan

Rohman (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah rapat komite audit dan kualitas laba. Frekuensi jumlah rapat yang tinggi menandakan komite audit aktif dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam hal meningkatkan efektivitas dan keterbukaan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengendalian internal dan risiko yang memadai. Oleh karena itu, komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan. Menurut Xie dan Davidson (2003), keberadaan dan aktivitas komite audit serta 'kecanggihan keuangan' yang dimilikinya merupakan faktor penting dalam menghambat kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, Dezoort et al (2002) (dalam Sutaryo, 2010) mengemukakan bahwa frekuensi pertemuan yang tinggi berhubungan dengan penurunan insiden terkait masalah pelaporan keuangan, serta meningkatkan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komite audit yang mempunyai frekuensi pertemuan yang lebih tinggi melakukan pengamatan serta pengawasan langsung yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan, termasuk kualitas laba.

Akan tetapi, hasil pengujian pada 8 perusahaan menengah menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penemuan Nabila dan Daljono (2013), Effendi dan Daljono (2013) serta Putri dan Laksito (2011) yang menyatakan bahwa aktivitas komite audit yang dicerminkan melalui jumlah rapat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kualitas laba. Hal ini dapat disebabkan oleh frekuensi rapat yang dilakukan komite audit dimungkinkan semata-mata hanya untuk memenuhi ketentuan minimum oleh OJK, yakni empat kali dalam setahun atau secara kuartalan.

Selain itu, hal yang mungkin terjadi di lapangan ialah apabila pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit tidak berfokus pada masalah-masalah terkait pengendalian internal, risiko, serta proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit yang sering melakukan

rapat belum tentu dapat menghasilkan keputusan yang dapat menekan praktik manajemen laba, sehingga yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari rapat yang dilakukan.

Selanjutnya, pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit belum tentu berfokus dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan praktik good corporate governance (Effendi dan Daljono, 2013). Sehingga efektivitas mekanisme good corporate governance dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen berkurang, dan masih membuka celah bagi manajer yang berperilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, jumlah rapat yang dilakukan komite audit belum tentu mencerminkan efektivitas pengendalian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Laba

Hasil pengujian yang dilakukan pada keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel menunjukkan menunjukkan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini serupa dengan hasil uji pada kelompok perusahaan besar yang terdiri dari 66 perusahaan dan kelompok perusahaan menengah yang terdiri dari 8 perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas laba yang dihasilkan perusahaan tidak terpengaruh oleh kualitas audit yang diberikan oleh auditor, dalam hal ini auditor Big 4 dan Non Big 4.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penemuan Khurana dan Raman (2004) serta Herusetya (2009), yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba antara perusahaan yang diaudit oleh auditor Big 4 maupun perusahaan yang diaudit oleh auditor Non Big 4. Penjelasan yang memungkinkan adalah karena kualitas audit yang diberikan oleh KAP Big 4 dan KAP Non Big 4 masih harus dipertanyakan. Marchesi (2000) dalam temuannya menyatakan bahwa karakteristik kualitas audit di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih dapat dikompromikan dengan berbagai faktor.

Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Raman (2004) menyimpulkan bahwa tidak semua auditor Big 4 memiliki audit

quality yang sama apabila diukur dengan cost of capital di masing-masing negara. Kurangnya regulasi yang mengatur independensi auditor juga menyebabkan pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba menjadi sulit diukur. Kurangnya independensi auditor tersebut dapat menyebabkan berkurangnya objektivitas auditor dalam pengambilan keputusan (Bamber dan Iyer, 2007).

Alasan lainnya, yakni auditor dinilai belum mampu untuk mendeteksi praktik manajemen laba karena manajemen memanfaatkan sistem akuntansi akrual (Kono dan Yuyetta, 2013). Basis akrual merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas actual diterima atau dikeluarkan (Sulistyanto, 2008). Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan komponen akrual untuk dimanipulasi tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum.

Cahnoyowati (2006) (dalam Christiani dan Nugrahanti) juga menemukan bahwa keberadaan auditor Big 4 bukanlah untuk mengurangi manajemen laba, melainkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara mengurangi gangguan yang ada di dalamnya sehingga bisa dihasilkan laporan keuangan yang lebih handal.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Meutia (2004), Sanjaya (2008), Effendi dan Daljono (2013), Sopian (2014) serta Kertayanti et al (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang dicerminkan melalui ukuran dan reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas laba yang dilaporkan.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, penelitian ini menemukan bahwa pada perusahaan secara keseluruhan dan perusahaan besar pada khususnya, struktur corporate governance komisaris independen dan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan struktur corporate governance kepemilikan institusional dan variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang dihasilkan perusahaan, baik pada perusahaan berukuran besar maupun pada perusahaan berukuran menengah.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen, rapat komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap kualitas laba, maka penelitian ini mengukur kualitas laba menggunakan model McNichols (2002) yang merupakan pendekatan terintegrasi dari model Jones dan Dechow dan Dichev, dengan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 hingga 2019.

Melalui metode purposive sampling, maka diperoleh 74 dan diklasifikasikan menjadi perusahaan berukuran besar dan menengah berdasarkan jumlah karyawan. Hasil klasifikasi untuk perusahaan besar, diperoleh 66 perusahaan besar, dan 8 perusahaan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme good corporate governance yang direpresentasikan oleh komisaris independen dan jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas laba, terutama pada perusahaan besar. Kehadiran komisaris independen dapat berperan sebagai pengawas yang efektif dalam mengawasi kebijakan yang diambil manajemen, serta jumlah rapat komite audit yang tinggi menunjukkan bahwa komite audit aktif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan serta menjamin bahwa mekanisme GCG diterapkan dengan baik di perusahaan. Sebaliknya, pada perusahaan menengah, komisaris independen dan jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini disebabkan oleh jumlah komisaris independen serta rapat komite audit yang dilakukan hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan formal, serta belum mampu untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kualitas laba.

Selain itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini karena pemilik saham institusional cenderung berfokus pada laba jangka pendek dan cenderung melakukan intervensi terhadap proses pelaporan keuangan. Kualitas audit yang dicerminkan oleh ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba karena kurangnya independensi auditor di Indonesia, serta tujuan auditor hanya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan bukan kualitas laba perusahaan.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: a) jumlah sampel yang masih sedikit karena kurangnya kelengkapan data keuangan (kurang dari 7 tahun) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di sector manufaktur, dan b) perusahaan sampel yang berukuran menengah jumlahnya relatif sedikit (8) dibandingkan perusahaan berukuran besar (66).

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah: a) memperbanyak jumlah sampel perusahaan dari sektor lain, dan b) menggunakan indikator selain jumlah karyawan yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam mengklasifikasikan ukuran perusahaan, contohnya menggunakan pengukuran total aset menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017, atau UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.

REFERENSI

- Bukhori, I., & Raharja, R. (2012). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2010) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Choi, J. H., Kim, C., Kim, J. B., & Zang, Y. (2010). Audit office size, audit quality, and audit pricing. *Auditing: A Journal of practice & theory*, 29(1), 73-97.
- Dechow, P.M., Ge, W. and Schrand, C. (2010), "Understanding earnings quality: a review of the proxies, their determinants and their consequences", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, pp. 344-401.
- Dichev, I., Graham, J., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2016). The misrepresentation of earnings. *Financial Analysts Journal*, 72(1), 22-35

- Emirzon, J. (2007). Prinsip-prinsip good corporate governance: paradigma baru dalam praktik bisnis Indonesia. Genta Press
- Herusetya, A. (2014). Pengaruh ukuran auditor dan spesialisasi auditor terhadap kualitas laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 46-70.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Juniarti, J., & Sentosa, A. A. (2009). Pengaruh good corporate governance, voluntary disclosure terhadap biaya hutang (costs of debt). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 88-100
- Kristanti, F. T., & Hendratno, H. (2017). Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 66-70.
- Meisser et al. (2006). *Auditing and Assurance Services*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schipper, K. and L. Vincent, 2003. Earnings Quality. *Accounting Horizons*, 17 (Supplement), pp. 97-110.
- Yulianda, A. R., & Sebrina, N. (2017). Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Kualitas Laba: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2), 1073-1092.